

KAB. PASER

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KAB. BALANGAN

KAB. HULU
SUNGAI UTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023

KAB. HULU
SUNGAI TENGAH

KOTA BARU

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada yang Maha Rohman dan Maha Rohim Allah SWT. Yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPBD Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan gambaran kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tata perencanaan dan pengelolaan bencana yang terencana, terpadu, sistematis dan menyeluruh dalam upaya terwujudnya BPBD yang mampu menanggulangi bencana sebagai landasan memperlancar Kabupaten Balangan yang.

Harapan kami kedepan semoga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat dijadikan bahan rujukan dan referensi serta evaluasi bagi BPBD Kabupaten Balangan dalam kerangka peningkatan kinerja kedepannya sebagai wujud pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur pemerintah.

Paringin,

30 Januari 2024 M

Rajab 1445 H

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Balangan

H. Rahmi, S.H.I
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 197809122006041008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 telah menyajikan Capaian kinerja BPBD Kabupaten Balangan berkaitan dengan perencanaan kinerja tahun 2022. Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan telah berupaya mencapai target kinerja sesuai dengan sasaran yang di tetapkan.

Adapun sasaran strategis yang di targetkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan dengan adanya perubahan cascading dan Pohon Kinerja terbaru adalah “Meningkatnya Ketahanan Bencana”

sedangkan indikator kinerja dari sasaran strategis adalah “Indeks Ketahanan Daerah (IKD)” “ dimana maksud IRB ini adalah semakin tinggi angka indeks Ketahanan Daerah maka semakin baik kinerja BPBD atau kabupaten dianggap mampu melakukan mitigasi bencana yang terjadi di wilayahnya. Untuk target IKD di Rencana Kerja Tahun 2023 adalah 0,56 dan diakhir pelaksanaannya nilai IKD kabupaten mengalami kenaikan di angka 0,52 yang mana nilai ini dianggap nilai yang sangat baik dengan nilai capaian kinerja 93 %

Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yang terdiri dari 2 Porgram Utama dan 1 Program pendukung yakni :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target capaian indikator Program tahun 2023 sebesar 100 %; sampai dengan bulan Desember 2023 dengan capaian realisasi anggaran 91,20 %. Dengan demikian capaian ini diatas angka 90 % .

Prosentase realisasi terhadap target Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 81 % terjadi Kenaikan di 10 %.

- Program Penanggulangan Bencana Daerah

Target capaian indikator Program tahun 2023 sebesar 100 %; sampai dengan bulan Desember 2023 dengan capaian realisasi anggaran 85,69 %.

Dibandingkan Realisasi pada Tahun 2022, target capaian 100% dengan presentasi realisasi sebesar 72 % terjadi kenaikan yang signifikan pada realisasi kinerja program.

- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Target Capaian indicator Program pada Tahun 2023 sebesar 100% sampai dengan desember 2023 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97,48 %, sedangkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 82 % pada program ini pun terjadi kenaikan pada realisasi anggaran dikarenakan kinerja program mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum SKPD	2
1.5 Sistematika Laporan	5
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026	6
2.2 Visi dan Misi	6
2.3 Kebijakan dan Strategi BPBD tahun 2021-2026	8
2.4 Penetapan Kinerja	13
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	24
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	28
BAB V PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Data SDM BPBD Berdasarkan jumlah pegawai	4
Tabel	1.2	SDM ASN BPBD Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan	4
Tabel	2.1	Penjelasan Visi Kabupaten Balangan 2021 - 2026	7
Tabel	2.2	Tujuan dan Sasaran 2023	14
Tabel	2.3	Program BPBD tahun 2023	15
Tabel	2.4	Matriks Perencanaan Kinerja BPBD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan Perubahan	15
Tabel	2.5	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 BPBD Kabupaten Balangan dan Perubahan	15
Tabel	3.1	Capaian Kinerja tahun 2023	27
Tabel	3.2	Capaian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan Sasaran Strategis)	27
Tabel	3.1	Penetapan Kinerja BPBD Tahun 2022	23
Tabel	3.3	Capaian Sasaran Strategis dengan cascading terbaru	28
Tabel	3.4	Target dan Tujuan Resntra 2021-2026 lama	28
Tabel	3.5	Target dan Tujuan Resntra 2021-2026 Penyesuaian	28
Tabel	3.6	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Tahun 2023	29
Tabel	3.7	Tabel Indeks Risiko Bencana Prov. Kalsel	31
Tabel	3.8	Pencapaian SPM 2023	32
Tabel	3.9	Tabel Pencapaian Kinerja BPBD Tahun 2023	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan dan akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan pada tahun 2023 melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu berdasarkan dengan program-program BPBD Kabupaten Balanga, serta mengacu pada visi dan misi Bupati Balangansebagaimana tertuang dalam renstra BPBD Tahun 2021-2026, sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi BPBD. Laporan Kinerja BPBD tahun 2023 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kewenangan BPBD yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi Organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan LKIP adalah memberikan gambaran kondisi obyektif atau profil BPBD tahun 2023. Perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan atau Perjanjian Kinerja (PK) BPBD Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
4. Peraturan Bupati Balangan nomor 73 tahun 2021 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan laporan ini juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja BPBD Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Badan Penanggulanagan Bencana Daerah tahun 2023 adalah sebagai :

1. Sarana Pertanggungjawaban Kinerja BPBD dalam pelaksanaan program selama tahun 2023
2. Alat identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKIP,
3. menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang..

1.4. Gambaran Umum SKPD

Badan Penannggulanagan Bencana Daerah Dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1. Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanggulangan

bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

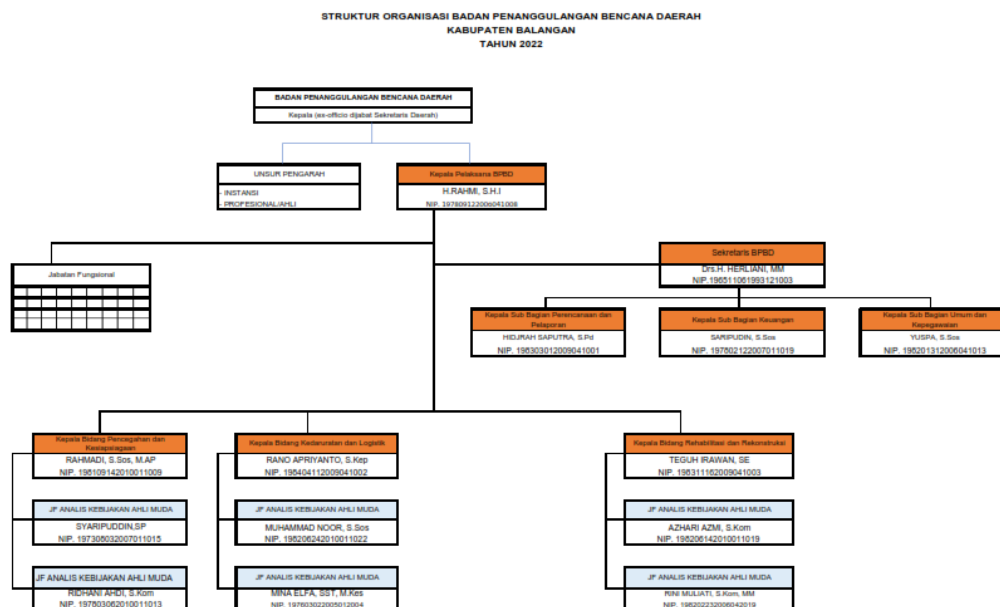
2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan terdiri satu (1) orang Kepala Pelaksana, satu (1) Orang Sekretaris, tiga (3) Orang Kepala Bidang, Sembilan (9) orang Kepala Sub Bagian dan Kepala seksi masing-masing bidang, secara struktur organisasi dibawah ini :



Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang cukup memadai, per Desember tahun 2023

Jumlah ASN BPBD adalah sebanyak 26 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data SDM BPBD Berdasarkan jumlah pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Pelaksana	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kasubag	3
5	JF	6
6	Staf	12
7	Non PNS	93
	JUMLAH	119

Tabel 1. 2
SDM ASN BPBD Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan

No	Pendidikan	Jabatan			Staf	Jumlah
		Ess II	Ess III	Ess IV		
1	S3	-	-	-	-	-
2	S2	-	2	2	-	4
3	S1	1	2	7	7	17
4	SMA	-	-	-	5	5
	JUMLAH	1	4	9	12	26

Dukungan Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

1. Gedung Kantor
2. Gudang Logistik
3. Gudang Peralatan
4. Alat-alat pertolongan bencana
5. 2 Unit Mobil Damkar, 1 unit mobil tangki air dan 3 mobil operasional lapangan.

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LKIP Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pada bagian ini berisi penjelasan tentang informasi tentang latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan serta gambaran umum SKPD serta sistematika laporan.
- BAB II : Penetapan kinerja, menyajikan gambaran singkat rencana strategis, rencana kerja dan Indikator kinerja utama dan program kegiatan tahun anggaran 2023
- BAB III : Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggung jawaban pencapaian hasil tahun 2023
- BAB IV : Pada bagian ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa akan datang yang akan dilakukan organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang diterapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Rencana Strategis BPBD diturunkan dari RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026.

2.2 VISI DAN MISI

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama - sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia.

Visi pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Pernyataan visi pembangunan jangka menengah Daerah menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka menengah harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.

Oleh karena itu, Visi Bupati/Wakil Balangan 2021-2026 sebagai pemegang mandat pembangunan dalam mewujudkan rasa aman dan ketentraman di masyarakat adalah :

“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju dan Sejahtera”

Tabel 2.1

PENJELASAN VISI KABUPATEN BALANGAN 2021 - 2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera	Membangun Desa	Membangun Desa adalah Mengembangkan Kawasan Pedesaan dan Konektivitas di Kabupaten Balangan
	Menata Kota	Menata kota adalah Menata Kawasan Perkotaan di Kabupaten Balangan
	Maju dan Sejahtera	Mewujudkan dan Meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan

Beranjak dari Visi tersebut dan mengarah untuk pencapaiannya maka dicanangkanlah misi Kabupaten Balangan 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Lima butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan Daerah, dimana BPBD Kabupaten Balangan masuk kedalam visi yang ke 5 yaitu

Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, Dan Agama Serta Pemerintahan Yang Harmonis Dan Kondusif”

Dalam mendukung Visi tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai Visi yaitu :

“Mewujudkan Kabupaten Balangan yang Aman dan Nyaman Melalui Pencegahan dan Penanganan Bencana yang Tanggap, Cepat dan Tepat”

2.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPBD TAHUN 2021 - 2026

Penjabaran dari arah kebijakan Nasional bidang penanggulangan bencana 2020-2024, yaitu penanggulangan bencana masuk kedalam prioritas mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing yang diarahkan kepada peningkatan ketangguhan bencana menuju kesejahteraan yang berketahanan untuk pembangunan berkelanjutan. Arah kebijakan dan strategi BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan strategis di bidang penanggulangan bencana, maka arah kebijakan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2021 – 2026) adalah :

1. Meningkatkan Pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana
2. Meningkatkan penanganan darurat dan ketersediaan logistic saat bencana

Dalam mengawal arah kebijakan tersebut, maka BPBD Kabupaten Balangan menetapkan beberapa langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan / sosialisasi pencegahan bencana
2. Melaksanakan pembinaan TRC dalam ketanggapan pemberian pertolongan korban bencana
3. Mengoptimalkan peran Pokja Responsif Gender
4. Optimisasi pengadaan sarpras penanganan bencana
5. Optimalisasi penyaluran logistik dengan cepat dan tepat
6. Optimalisasi koordinasi lintas sector dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas visi, misi, tujuan, sasaran

yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan BPBD Kabupaten Balangan diklasifikasikan ke dalam program umum dan program khusus. Program umum merupakan program yang ada di setiap SKPD, sedangkan program khusus merupakan program yang mendukung secara langsung terhadap pelaksanaan sasaran peningkatan pemahaman, kesadaran, kesiapsiagaan serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BPBD Kabupaten Balangan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BPBD. Hal tersebut mencakup sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

- 8. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- 9. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
10. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas
 - Respon cepat darurat bencana kabupaten / kota
 - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota
 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Respon cepat bencana non alam epidemi / wabah penyakit
 - Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
11. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan kelembagaan bencana kabupaten / kota
 - Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten / kota
 - Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan
 - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN****12. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota**

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota
- Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
- Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / kota
- Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
- Pembinaan aparaturnya pemadaman kebakaran
- Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
- Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
- Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran
- Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
- Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran
- Pemetakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
- Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga

13. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

14. Investigasi Kejadian Kebakaran

- Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab

15. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana

16. Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi

- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
- Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi

2.4 PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Penetapan kinerja ini ditetapkan dalam kerangka penyusunan rencana kinerja. Perjanjian kinerja diformulasikan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disepakati antara pengembalian tugas dengan atasan/pimpinan (performance agreement). Penetapan kinerja juga merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah

disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting proses) selesai.

sebagai realisasi dari penetapan kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja. Penetapan kinerja dapat diperbaiki dalam hal pimpinan/atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan tersebut, sehingga kedua belah pihak sepakat atas target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator sasaran. Indikator ini dapat lebih dari satu buah indikator untuk satu buah sasaran. Indikator ditetapkan dengan satuan yang terukur untuk mempermudah pengukuran kinerja. Sasaran-sasaran tersebut dijabarkan dengan program. Satu buah sasaran bisa dijabarkan dengan lebih dari satu program, dan program tersebut kemudian dijabarkan dengan kegiatan. Indikator-indikator tersebut berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Formulir Penetapan Kinerja BPBD Kabupaten Balangan pada tahun 2023 dengan mengacu pada RPJM 2021 - 2026, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 :

Tabel 2.2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran	Target
				2023
1	Menurunnya resiko bencana	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,56

Pada Tabel diatas disampaikan bahwa BPBD dalam penyesuaian Renstra dan penyesuaian dengan Pohon kinerja serta cascading terbaru berubah, Dimana tujuan BPBD Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana dengan indikator sasaran Indeks Risiko Bencana, berdasarkan arahan Menpan maka BPBD melakukan perubahan dengan Tujuan Menurunnya Risiko Bencana dan Sasaran Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah dengan indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah.

Berdasarkan Tugas dan Fungsinya BPBD Menjalankan Tiga Program, satu program Utama, satu program pendukung dan satu program penunjang urusan pemerintahan

Tabel 2.3

Program	Anggaran (Rp)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.432.293.148
Penanggulangan Bencana	6.141.272.450
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	16.437.513.800

Berdasarkan table diatas Program utama BPBD adalah program penanggulangan bencana, program pendukung adalah program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Dimana BPBD selama ini menghandel urusan kebakaran, karena di kabupaten Balangan belum ada SKPD yang mengampu nomenklatur urusan kebakaran sehingga di titipkanlah urusan tersebut pada BPBD Balangan.

Table 2.4
Matriks Perencanaan Kinerja BPBD Kabupaten Balangan
Periode 2021-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	139,89	139,89	139,89	139,89	139,89	139,89

**Matriks Perencanaan Kinerja Perubahan BPBD Kabupaten Balangan
Periode 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
1	Menurunnya resiko bencana	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,56	0,60	0,64	0,68

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Indikator Kineja Utama BPBD Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
BPBD KABUPATEN BALANGAN**

No .	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	Makna, Alasan Pemilihan, Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	<p>Makna : Menurunnya angka Indeks Risiko Bencana</p> <p>Alasan Pemilihan : Mencerminkan penurunan angka risiko bencana dari target yang direncanakan</p> <p>Perhitungan : Hasil Evaluasi dan Penilaian IRB Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan rumus :</p> $Risiko = \frac{Bahaya \times Kerentanan}{Kapasitas}$	BPBD	IRBI BNPB

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2021-2026
BPBD KABUPATEN BALANGAN

No	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	Makna, Alasan Pemilihan, Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatkan angka Indeks Ketahanan Daerah	BPBD	BNPB

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

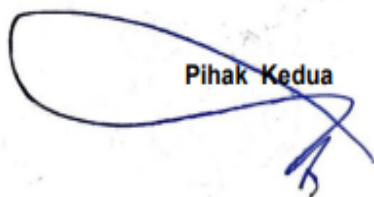
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. RAHMI, S.H.I
Jabatan : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom
Jabatan : BUPATI BALANGAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Parangin, September 2023
Pihak Pertama,

H. RAHMI, S.H.I
NIP.19780912 200604 1 008

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

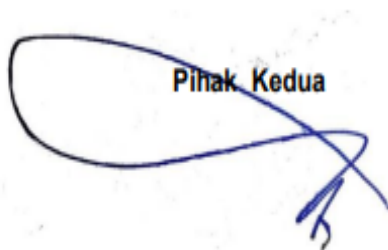
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,56

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.892.860.703,-	Rp. 8.432.293.148,-	APBD Perubahan
2	Penanggulangan Bencana	Rp. 4.893.704.050,-	Rp. 6.141.272.450,-	APBD Perubahan
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1.113.564.800,-	Rp. 16.437.513.800,-	APBD Perubahan
	Total	Rp. 12.900.129.553,-	Rp. 31.011.079.398,-	

Pihak Kedua



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Paringin, September 2023

Pihak Pertama,



H. RAHMI, S.H.I
NIP.19780912 200604 1 008

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN****PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEKRETARIS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Drs.H. HIRLIANI, MM*

Jabatan : SEKRETARIS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : *H. RAHMI, S.H.I*

Jabatan : KEPALA PELAKSANA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 3 Oktober 2023

Pihak Pertama,

Drs. H. HIRLIANI, MM
NIP. 19651106 199312 1 003

Pihak Kedua

H. RAHMI, S.H.I
NIP. 19780812 200604 1 008

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

SEKRETARIS

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya manajemen administrasi perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100 %
		Persentase penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100 %
		Persentase penyusunan dokumen keunagan perangkat daerah	100 %
		Persentase pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			APBD PERUBAHAN
	Rp. 6.892.860.703	Rp. 8.432.293.148	
KEGIATAN :			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 145.819.600	Rp. 236.140.400	APBD PERUBAHAN
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 21.339.600	Rp. 108.498.400	APBD PERUBAHAN
• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	APBD PERUBAHAN

<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	Rp. 118.480.000	Rp. 121.642.000	APBD PERUBAHAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 317.378.000	Rp. 421.077.100	APBD PERUBAHAN
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 	Rp. 45.000.000	Rp. 53.499.100	APBD PERUBAHAN
<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 	Rp. 272.378.000	Rp. 367.578.000	APBD PERUBAHAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.475.370.155	Rp. 4.640.575.388	APBD PERUBAHAN
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 	Rp. 2.765.092.787	Rp. 3.501.014.891	APBD PERUBAHAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 486.803.100	Rp. 1.121.738.000	APBD PERUBAHAN
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	Rp. 222.978.900	Rp. 502.122.200	APBD PERUBAHAN
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 	Rp. 44.045.300	Rp. 52.486.900	APBD PERUBAHAN
<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	Rp. 194.508.600	Rp. 541.858.600	APBD PERUBAHAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 623.279.288	Rp. 811.223.200	APBD PERUBAHAN
<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 	Rp. 298.628.488	Rp. 264.682.800	APBD PERUBAHAN
<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	168.680.000	Rp. 382.249.600	APBD PERUBAHAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 419.365.260	Rp. 377.024.760	APBD PERUBAHAN

• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 193.383.600	Rp. 112.907.600	APBD PERUBAHAN
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 100.186.660	Rp. 96.119.160	APBD PERUBAHAN

Paringin, 3 Oktober 2023

Pihak Pertama,



Drs. H. HIRLIANI, MM
NIP. 19651106 199312 1 003

Pihak Kedua



H. RAHMI, S.H.I.
NIP. 19780912 200604 1 008

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Melihat besarnya jumlah kejadian dan dampak yang ditimbulkan dari bencana, maka Pemerintah Kabupaten Balangan diharapkan memiliki penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, sehingga potensi bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu.

Hal ini lah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Balangan melalui BPBD Kabupaten Balangan menetapkan 4 (empat) aspek Penanggulangan Bencana (PB), yakni aspek pemulihan, aspek pencegahan dan mitigasi, aspek tanggap darurat dan aspek kesiapsiagaan dengan melibatkan elemen pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Akademisi, dan Media).



Empat aspek Penanggulangan Bencana (PB) dengan melibatkan elemen pentahelix ini kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan BPBD Kabupaten Balangan dengan indikator kerjanya:

Tabel

Hubungan Aspek Penanggulangan Bencana dan Indikator Kinerja BPBD



Indikator Sasaran dan Program yang merupakan perwujudan dari aspek penanggulangan bencana ini kemudian dituangkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja BPBD tahun 2023 Pelaksanaan penilaian Perjanjian Kinerja (PK) kemudian dilaksanakan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis. Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target sebuah kegiatan berdasarkan indikator masukan dan keluaran. Sedangkan untuk pengukuran tingkat efektivitas adalah dengan membandingkan target dan realisasi berdasarkan indikator keluaran dan hasil.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, Untuk sebuah kegiatan yang kondisinya jika semakin tinggi angka realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Prosentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk sebuah kegiatan dengan kondisi jika semakin rendah angka realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Setelah memperoleh angka capaian maka dilakukan analisis dan evaluasi. Evaluasi terhadap setiap indikator kinerja dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan satu kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pencapaian suatu sasaran/kegiatan, dinilai dan dipelajari guna perbaikan lebih lanjut.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPBD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPBD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	139,89	115,21	121%

Tabel
Capaian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan Sasaran Strategis)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,56	0,52	93%

Dari data table diatas Pada tahun 2023, indikator sasaran strategis BPBD pada Perjanjian Kinerja 2023 yaitu meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah telah mencapai 121% dari target yang ditetapkan atau telah mencapai nilai sangat baik, tetapi setelah adanya perubahan sasaran strategis pada rencana kerja perubahan tahun 2023 yaitu sasaran meningkatnya ketahanan bencana daerah dengan indicator indeks ketahanan daerah mencapai nilai 93% dari target yang telah ditetapkan dengan capaian sangat baik.

Dibawah ini disajikan pencapaian sasaran strategis BPBD yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja, Tolak ukur capaian sasaran Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah diukur dengan satu indikator yaitu : Indeks Ketahanan daerah

Kinerja Sasaran Kapasitas Daerah dalam meningkatnya ketahanan daerah melalui indeks ketahanan daerah pada tahun 2023 dan beberapa tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis sesuai dengan Cascading dan Pohon Kinerja 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	IKD 2021	IKD 2022	IKD 2023	Capaian s/d 2023 terhadap target 2023
1	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan daerah	0,56	0,39	0,43	0,52	93%

Dari Tabel diatas capaian target indikator sasaran strategis BPBD telah mancapai angka 0,52 dengan capaian kinerja 93% pada tahun 2023, jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai Indeks Ketahanan Daerah terus naik walaupun masih belum sampai dengan target yang direncanakan.

Tabel 3.4
Target Tujuan dan Sasaran Renstra 2021 - 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana	139,89	139,89	139,89	139,89	139,89	139,89

Tabel 3.5
Target Tujuan dan Sasaran Renstra 2021 – 2026 Penyesuaian

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target			
		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,56	0,56	0,60	0,64

Tabel 3.6
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD
 Tahun 2023**

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.432.293.148
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	236.140.400
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.498.400
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	121.642.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.640.575.388
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.614.535.388
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.040.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	421.077.100
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53.499.100
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	367.578.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.121.738.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.275.100
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	502.122.200
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.486.900
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	11.995.200
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	541.858.600
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	824.514.300
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.000.000
1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	449.514.300
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.024.760
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112.907.600
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.998.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.119.160
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	811.223.200
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	264.682.800
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000

1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	382.249.600
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.290.800
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.141.272.450
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	822.220.000
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	97.000.000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per. Jenis Bencana)	725.220.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	4.823.819.750
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2.773.820.100
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	62.713.050
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	523.585.400
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.307.046.600
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	156.654.600
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	495.232.700
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	47.159.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	448.073.700
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	16.437.513.800
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.339.181.300
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.339.181.300
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	98.332.500
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	98.332.500
JUMLAH TOTAL		31.011.079.398
<i>Tiga Puluh Satu Milyar sebelas juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah</i>		

Tabel 3.7
Tabel Indeks Risiko Bencana Tahun 2015 - 2023 Kabupaten/Kota Prov. Kalsel

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kotabaru	205,20	159,70	159,70	158,79	158,79	158,79	172,71	162,17	147,79
2	Tanah Laut	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	156,33	169,22
3	Banjar	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	165,12	150,41	133,44
4	Hulu Sungai Selatan	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	150,00	141,29	129,09
5	Barito Kuala	190,00	179,68	179,68	155,45	155,45	155,45	155,96	140,65	149,60
6	Tabalong	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	149,03	130,06	142,82
7	Balangan	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	139,89	133,77	126,16	115,21
8	Hulu Sungai Utara	128,40	128,40	128,40	128,40	128,40	128,40	126,00	126,00	114,97
9	Hulu Sungai Tengah	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	133,87	125,74	125,74
10	Tanah Bumbu	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	143,94	125,17	137,92
11	Tapin	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	128,79	110,71	121,07
12	Kota Banjarbaru	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	95,78	103,35
13	Kota Banjarmasin	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	84,09	92,44

Diatas disampaikan pencapaian Indeks Risiko Bencana dalam kurun waktu tahun 2015 – 2023 dimana kabupaten balangan terus mengalami penurunan angka indeks risiko bencana, dibawah ini juga disampaikan grafik pencapaian sasaran strategis BPBD sesuai dengan cascading dan pohon kinerja terbaru



Berdasarkan Grafik diatas bahwan pencapaian BPBD untuk indeks Ketahanan daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun, dibawah ini program penunjang pencapaian nilai indeks ketahanan daerah

Program Penanggulangan Bencana :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dimana kegiatan ini berisikan Sosialisasi dan Informasi tentang Penanganan Kebencanaan bagi masyarakat yang berada diwilayah Rawan Bencana, seperti sosialisasi

bahaya Pembakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) ataupun sosialisasi tentang mitigasi bencana alam lainnya.(SPM), dengan target indikator jumlah desa yang mendapat informasi rawan bencana sejumlah 400 Orang dengan realisasi capaian realisasi kinerja 100%

2. Kegiatan Pelayanan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dimana kegiatan ini berisikan tentang peningkatan kapasitas TRC BPBD, bimbingan teknis Kebencanaan bagi Aparat Desa dan Perangkat Kecamatan, serta Penambahan Peralatan Evakuasi Bencana. Dengan target indikator prosentase Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan dengan tingkat capaian 100%
3. Kegiatan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, kegiatan ini berisikan penyaluran bantuan logistic bagi masyarakat yang terdampak bencana seperti bantuan bagi korban banjir, covid-19 dan juga korban bencana kebakaran pemukiman. Dengan target indikator Jumlah logistic yang disalurkan 45 Paket dengan capaian kinerja 100%,
Dibawah ini disampaikan table pencapaian SPM tahun 2023

Tabel 3.8
Pencapaian SPM 2023 BPBD

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	
(1)	(2)	(3)			(4)	
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS PARIPIURNA			100.00 %	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	7,400	7,400	0	100.00 %	
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %	
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	8,000	8,000	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	400	400	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	10	10	0	100.00 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	871	871	0	100.00 %	
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %	

A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		871	871	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
1 .	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	243	243	0 100.00 %
2 .	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	90	90	0 100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	ya	Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		7,813	7,813	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
1 .	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1	1	0 100.00 %
2 .	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	7,813	7,813	0 100.00 %
3 .	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0 100.00 %
4 .	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0	0	0 0 %
5 .	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	2	2	0 100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)			(4)
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		112	112	0	100.00 %
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			20.00 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
1 .	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	15	15	0 100.00 %
2 .	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MIKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	1	1	0 100.00 %
3 .	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	91	91	0 100.00 %
4 .	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	216	216	0 100.00 %
5 .	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	15	15	0 100.00 %
6 .	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0	0	0 0 %

Faktor-faktor Pendukung Pencapaian Kinerja BPBD Kabupaten Balangan dalam menurunkan angka Indeks Ketahanan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana (draft Perda PB);
2. Dukungan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan;
3. Semangat gotong-royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi;
4. Antusias aparat desa dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat tanggap darurat bencana;

5. Keberhasilan evakuasi bencana didukung dengan adanya alat perlindungan diri yang cukup memadai untuk Tim Reaksi Cepat yang melakukan evakuasi korban;
6. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui Program Daerah dan Pusat
7. Penambahan dan Peningkatan Kapasitas Personil TRC melalui program internal BPBD Kabupaten Balangan dan juga BPBD Provinsi

Selain Faktor Pendukung keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat yaitu :

1. Belum terpenuhinya legalisasi regulasi kelembagaan.
2. Sinergisitas secara kelembagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal, karena belum terbentuknya forum PRB;
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas;
4. Belum terpenuhinya SDM bersertifikasi sesuai standar kompetensi dalam penanggulangan bencana.

Beberapa Solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Dengan Melakukan Percepatan regulasi kelembagaan;+ narasi
2. Membangun koordinasi dengan stakeholder terkait melalui FGD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk peningkatan nilai indeks kapasitas daerah;
3. Membangun koordinasi sinergis dengan aparat di tingkat desa dalam peningkatan pengetahuan dan kapasitas tentang penanggulangan bencana;
4. Memfasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Induk dalam peningkatan kapasitas evakuasi korban bencana;
5. Melaksanakan simulasi penanggulangan bencana bersama-sama aparat pemerintah daerah maupun masyarakat.

SASARAN STRATEGIS**Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah**

Sasaran ini diintervensi dengan dua program yaitu **Program Penanggulangan Bencana** dan **Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran** dengan lima kegiatan utama sebagai berikut :

Program Penanggulangan Bencana :

1. Layanan Informasi Rawan Bencana;
2. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
3. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
1. Layanan Informasi Rawan Bencana dengan alokasi anggaran setelah perubahan Rp. 822.220.000,- dengan tingkat realisasi kinerja anggaran 100 % dan realisasi Anggaran Rp. 790.092.772,-. Output yang dihasilkan berupa Sosialisasi Penyuluhan, Informasi dan Edukasi bagi masyarakat terhadap risiko Bencana di Kabupaten Balangan, dibawah ini kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang penanganan bencana :



Remark: K ~ H PB BPBD balangan
Network: 14 Sep 2023 11.01.39 WITA



2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mendapat alokasi sebesar Rp 4.823.819.750 setelah perubahan dan terealisasi sebesar Rp.4 020.348.956 atau terserap 83,34 %. Dalam layanan ini, sub kegiatannya berupa
- a. **Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** dengan output 1 paket pengadaan peralatan kebencanaan dengan pagu anggaran setelah perubahan berjumlah Rp 2.773.820.100 dan terealisasi sejumlah Rp. 2.134.170.987 dengan capaian kinerja 100%, alat yang diadakan berupa Perahu Viber, Perahu Karet, Lampu tower, Motor Trail (operasional lapangan) dan Mesin Pemadan Portabel (Alkon).
 - b. **Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota** output 1 Dokumen Anggaran berjumlah Rp. 62.713.050 dan terealisasi sejumlah Rp. 44.935.933 dengan capaian kinerja 100%
 - c. **Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota** dengan Indikator Panjang Bangunan Penahan Longsor Tebing yang Berfungsi, untuk Indikator tersebut tidak sesuai dengan Kepmendagri No 50-5889 dimana indikator sub kegiatan tersebut adalah Jumlah dokumen pasca bencana Kabupaten/Kota Melalui pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), dengan jumlah alokasi anggaran setelah perubahan Rp. 523.585.400 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp 518.539.236 dengan capaian kinerja 100%
 - d. **Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota** dengan indikator jumlah posko PBP yang berfungsi, disini juga untuk indikator tidak sesuai dengan kepmendagri 50-5889 untuk sub kegiatan tersebut indikatornya adalah jumlah personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan manajerialnya. Untuk sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp. 1.307.046.600 yang pada awal sebelum perubahan berjumlah Rp. 1.248.046.600 dengan realisasi anggaran sejumlah 1.207.482.300 dengan capaian kinerja 100% dibawah ini adalah kegiatan peningkatan kapasitas TRC BPBD tahun 2023





3. **Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** dialokasikan anggaran sejumlah Rp. 495.232.700 setelah perubahan dan terealisasi sebesar Rp. 451.834.612 atau dengan serapan anggaran 91% Dalam Layanan ini ada dua sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- **Respon Cepat darurat Bencana Kabupaten/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.159.000 dan terserap sebesar Rp. 19.360.000 atau 41% serapan anggaran.
 - **Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 448.073.700 dan terserap sejumlah Rp. 432.474.612 atau 96,5% serapan anggaran,

Dibawah ini adalah dokumentasi kegiatan layanan tersebut :

TRC BPBD Melakukan Evakuasi korban banjir





BPBD Balangan menyerahkan Bantuan



Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

1. Layanan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan **Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** alokasi anggaran Rp. 16.339.181.300,- telah terealisasi Rp. 15.933.359.458 atau serapan anggaran 97,5% dengan capaian kinerja 100%. Dibawah ini dokumentasi beberapa kegiatan Pengendalian dan pemadaman kebakaran:
2. Layanan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dengan alokasi anggaran Rp. 98.332.500, dengan realisasi anggaran sejumlah Rp. 90.532.500,- dengan presentase serapan 92% dan capaian kinerja 100%.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan tersebut :

Bantuan Mobil Pemadam Kebakaran untuk kecamatan sekabupaten Balangan



Dokumentasi Penyerahan Mobil Pemadam



Penyerahan Mesin Alkon







4. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mendapat alokasi sebesar Rp 5.650.915.410 setelah perubahan dan terealisasi sebesar Rp.3 884.663.346 atau terserap 69 %. Dalam layanan ini, sub kegiatannya berupa
- e. **Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** dengan output 1 paket pengadaan peralatan kebencanaan dengan pagu anggaran setelah perubahan berjumlah Rp 1.988.367.510 dan terealisasi sejumlah Rp. 1.680.560.251 dengan capaian kinerja 100%, alat yang diadakan berupa Perahu Viber, Life Jacket, dan pengadaan Alat Pemadam Api Ringan atau APAR
 - f. **Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota** output 1 Dokumen Analisis Risiko Bencana tidak bisa direalisasikan karena anggaran kurang mencukupi dan anggaran yang masuk setelah perubahan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 anggaran berjumlah Rp. 1.702.993.700 dan terealisasi sejumlah Rp. 666.474.539 dengan capaian kinerja 85%
 - g. **Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota** dengan Indikator Panjang Bangunan Penahan Longsor Tebing yang Berfungsi, untuk Indikator tersebut tidak sesuai dengan Kepmendagri No 50-5889 dimana indikator sub kegiatan tersebut adalah Jumlah dokumen pasca bencana Kabupaten/Kota Melalui pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), dengan jumlah alokasi anggaran setelah perubahan Rp. 248.303.950 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp 252.531.097 dengan capaian kinerja 100%
 - h. **Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota** dengan indikator jumlah posko PBP yang berfungsi, disini juga untuk indikator tidak sesuai dengan kepmendagri 50-5889 untuk sub kegiatan tersebut indikatornya adalah jumlah personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan manajerialnya. Untuk sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp. 1.711.248.250 yang pada awal sebelum perubahan berjumlah Rp. 2.040.647.600 dengan realisasi anggaran sejumlah 1.312.084.156 dengan capaian kinerja 100% dibawah ini adalah kegiatan peningkatan kapasitas TRC BPBD tahun 2023



Habar BPBD Balangan

11 Oktober 2022 pukul 02:11 · 🌐

BPBD BALANGAN kembali menggelar Pelatihan Angkatan ke 2 Peningkatan kapasitas Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD KABUPATEN BALANGAN DI HOTEL RODITHA BANJARMASIN, TAHUN 2022, Selasa, 11 Oktober 2022.

Demikian foto terlampir.



2 Kali Dibagikan



Habar BPBD Balangan

6 September 2022 · 🌐

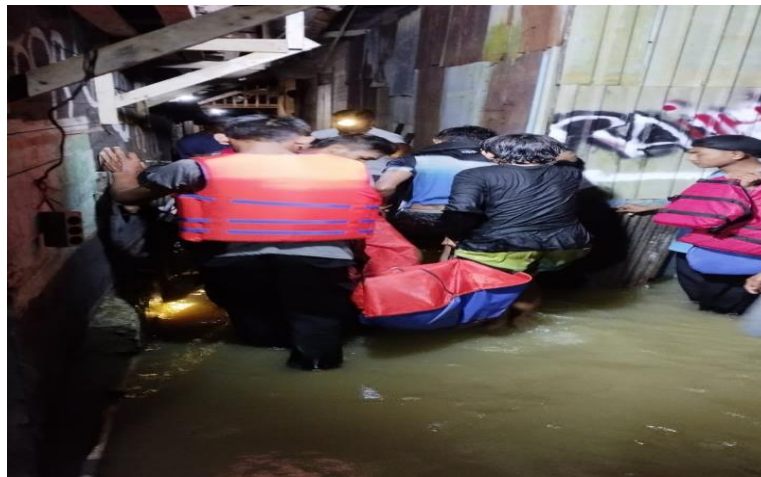
BPBD Balangan menggelar Bimtek pembekalan anggota TRC baru sebagai tahapan implementasi "Si Jari Tangguh" dari tanggal 5-7 September 2022.



5. **Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** dialokasikan anggaran sejumlah Rp. 312.676.610 setelah perubahan dan terealisasi sebesar Rp. 252.531.097 atau dengan serapan anggaran 81% Dalam Layanan ini ada satu sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu : **Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 312.676.610 dan terserap sejumlah Rp. 252.531.097 atau 81% serapan anggaran, dibawah ini adalah dokumentasi kegiatan layanan tersebut :

TRC BPBD Melakukan

Evakuasi Korban Tenggelam di Desa Juai Kecamatan Juai tanggal 16 september 2023



TRC BPBD Melakukan Evakuasi

Orang Tenggelam Di Desa Baruh Panyambaran Kec. Halong 25 September 2023



TRC BPBD Melakukan Evakuasi
Rumah Warga yang tertimpa Pohon Tumbang akibat cuaca ekstrem Desa tawahan Kec. Juai
29 September 2023



Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

3. Layanan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan **Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** alokasi anggaran Rp. 573.369.000,- telah terealisasi Rp. 459.111.175 atau serapan anggaran 80% dengan capaian kinerja 100%. Dibawah ini dokumentasi beberapa kegiatan Pengendalian dan pemadaman kebakaran:

TRC BPBD membantu penanganan musibah kebakaran pemukiman
Desa Kambiyain Tebing Tinggi Tanggal 29 Januari 2023



TRC BPBD membantu penanganan musibah kebakaran pemukiman
Kelurahan Batu Piring, Parsel Tanggal 08 Maret 2023



TRC BPBD membantu penanganan musibah kebakaran pemukiman
Desa Kasai, Batumandi Tanggal 06 April 2023



TRC BPBD membantu penanganan musibah kebakaran pemukiman
Desa Banua Hanyar, Batumandi Tanggal 13 Julil 2023



4. Layanan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dengan alokasi anggaran Rp. 124.570.000, dengan realisasi anggaran sejumlah Rp. 112.339.000,- dengan presentase serapan 90% dan capaian kinerja 100% berikut beberapa dokumentasi kegiatan tersebut :

**SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN PEMUKIMAN DI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023
KELURAHAN PARINGIN TIMUR KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN
SENIN, 31 OKTOBER 2023**



**SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN PEMUKIMAN
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023
DESA TRANS PAPUYUAN KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN
SELASA, 01 NOVEMBER 2023**



**SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN PEMUKIMAN DI KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2023
DESA MUARA JAYA KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN
RABU, 02 NOVEMBER 2023**



**SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN PEMUKIMAN DI KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2023
DESA BARUH PANYAMBARAN KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN
KAMIS, 24 NOVEMBER 2023**



Tabel. 3.9

Daftar Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan, Anggaran dan Realisasi serta tingkat efisiensi Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Uraian	Jumlah Anggaran		Penyerapan Anggaran			Tingkat Efisiensi	
			Sebelum	Sesudah	Target	Realisasi		Rp.	%
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%		
4	5	6	7	8					
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota									
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	152.121.112	152.121.112	152.121.112	86.460.000	57	65.661.112	43
			152.121.112	152.121.112	152.121.112	86.460.000	57	65.661.112	43
2	Administrasi	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.810.835.347	3.546.757.451	3.546.757.451	3.221.815.222	91	324.942.229	9
3	Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.765.092.787	3.501.014.891	3.501.014.891	3.201.815.222	91	299.199.669	9
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9.600.000	9.600.000	9.600.000	3.000.000	31	6.600.000	69
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	96.150.000	261.150.000	261.150.000	255.753.225	98	5.396.775	2
6		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	11.700.000	21.700.000	21.700.000	21.700.000	100	-	0
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	270.623.600	658.197.150	658.197.150	521.505.779	79	136.691.371	21
8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.949.400	13.949.400	13.949.400	13.941.600	100	7.800	0
9		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	167.045.250	353.373.650	353.373.650	254.429.000	72	98.944.650	28
10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.930.950	40.186.100	40.186.100	29.361.150	73	10.824.950	27
11		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	21.850.000	21.850.000	21.850.000	15.600.000	71	6.250.000	29
			45.848.000	228.838.000	228.838.000	208.174.029	91	20.663.971	9
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	585.500.000	585.500.000	223.316.000	38	362.184.000	62
			-	360.500.000	360.500.000	-	0	360.500.000	100
13	Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	225.000.000	225.000.000	223.316.000	99	1.684.000	1
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	487.311.572	489.581.768	489.581.768	236.761.993	48	252.819.775	52
15		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.363.492	272.920.000	272.920.000	81.720.000	30	191.200.000	70
16		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.500.000	152.500.000	152.500.000	105.595.113	69	46.904.887	31
			60.448.080	64.161.768	64.161.768	49.446.880	77	14.714.888	23
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	675.343.656	985.633.656	985.633.656	856.239.383	87	129.394.273	13
18		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272.022.000	357.312.000	357.312.000	249.952.383	70	107.359.617	30
19		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.250.000	14.250.000	14.250.000	8.240.000	58	6.010.000	42
20		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	225.000.000	225.000.000	223.166.000	99	1.834.000	1
			389.071.656	389.071.656	389.071.656	374.881.000	96	14.190.656	4
Program Penanggulangan Bencana Daerah									
21	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	209.999.850	902.855.000	902.855.000	828.881.000	92	73.974.000	8
22		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	109.999.850	55.530.000	55.530.000	24.616.000	44	30.914.000	56
			100.000.000	847.325.000	847.325.000	804.265.000	95	43.060.000	5
23	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	2.642.826.120	5.650.913.410	5.650.913.410	3.884.663.346	69	1.766.250.064	31
24		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	343.751.350	1.988.367.510	1.988.367.510	1.680.568.251	85	307.799.259	15
25		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	89.999.700	1.702.993.700	1.702.993.700	666.474.539	39	1.036.519.161	61
26		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	168.427.470	248.303.950	248.303.950	225.536.400	91	22.767.550	9
			2.040.647.600	1.711.248.250	1.711.248.250	1.312.084.156	77	399.164.094	23

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		280.596.640	312.676.610	312.676.610	252.531.097	81	60.145.513	92
27	<i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>		280.596.640	312.676.610	312.676.610	252.531.097	81	60.145.513	92
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran									
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		573.369.000	573.369.000	573.369.000	459.111.175	80	114.257.825	20
28	<i>Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		573.369.000	573.369.000	573.369.000	459.111.175	80	114.257.825	20
			16.930.000	124.570.000	124.570.000	112.339.000	90	12.231.000	10
29	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</i>		16.930.000	124.570.000	124.570.000	112.339.000	90	12.231.000	10
Total			8.199.176.897	14.118.755.157	14.118.755.157	10.827.038.220	77	3.291.716.937	23

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023, anggaran belanja terserap setinggi 77 % atau Rp 10.939.377.220 (setelah perubahan) sehingga ada Sisa Lebih Anggaran (SILPA) Rp 3.303.947.937 atau 23 %. Kondisi ini agak menurun bila dibandingkan dengan tahun 2021 dimana tingkat penyerapan 92 % atau Rp 7.093.593.004 dari input anggaran yang dialokasikan (setelah perubahan) sebesar Rp 7.719.795.480 sehingga ada selisih lebih anggaran belanja yang tidak terserap Rp 626.202.476 Tingkat penyerapan anggaran belanja di lingkungan BPBD ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada di tingkat 92%. Tingkat penyerapan yang mengalami penurunan ini secara umum dikarenakan ada pagu belanja yang tidak bisa direalisasikan karena tidak termuat dalam aplikasi SIPD perencanaan dan kegiatan belanja THL yang tidak terealisasi.


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKIP sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam memberikan bantuan layanan urusan kebencanaan yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang aman dan tentram dari bahaya bencana untuk seluruh masyarakat Balangan khususnya di wilayah yang masuk kedalam peta rawan bencana

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BPBD Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (**Good Governance**) dan pemerintah yang bersih (**Clean Government**).

Paringin, Januari 2024
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Kabupaten Balangan



H. Rahmi, S.H.I
Pembina

NIP. 197809122006041008